

## Peran Mediasi Materialisme Pada Pengaruh Harga Diri dan Iklim Etika Terhadap Intensi Korupsi Kader Partai Politik

Ifda Hanum<sup>1</sup>, Rilla Sovitriana<sup>2</sup>  
Universitas Persada Indonesia YAI<sup>1,2</sup>  
E-mail: ifdahanum@yahoo.com<sup>1</sup>, rilla.sovitriana@upi-yai.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi masyarakat masih saja terjadi. Anggota DPR yang terpilih berasal dari partai politik yang merupakan organisasi tempat masyarakat berdemokrasi. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa harga diri dan iklim etika dalam organisasi berpengaruh terhadap intensi korupsi. Selain itu, materialisme menjadi mediator antara harga diri dan intensi korupsi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui intensi korupsi pada kader partai politik sebagai prespektif baru. Data yang didapat dari sampel salah satu partai politik, kemudian diolah menggunakan teknik regresi linier dengan bantuan *software* IBM versi 22. Hasilnya menunjukkan bahwa harga diri berpengaruh -0.152 ( $p=0.002$ ) dan iklim etika berpengaruh -0.163 ( $p=0.001$ ) terhadap intensi korupsi. Sementara itu, materialisme menjadi *partial mediator* pengaruh harga diri terhadap intensi korupsi. Faktor internal dalam diri kader partai berperan penting dalam menurunkan intensi korupsi. Selain itu, program-program kegiatan pelatihan yang dapat meningkatkan iklim etika dalam organisasi partai politik juga sangat dibutuhkan seperti program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu (PCB Terpadu) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama partai politik untuk mewujudkan politik Indonesia yang berintegritas.

**Kata kunci :** *Intensi Korupsi, Materialisme, Harga diri, Iklim Etika*

### ABSTRACT

Corruption cases in Indonesia involving members of *Dewan Perwakilan Rakyat* (DPR) as representatives of society are still occurring. The elected DPR members come from political parties, which are organizations where people have democracy. Previous studies have shown that self-esteem and ethical climate in organizations affect the intensity of corruption. In addition, materialism becomes a mediator between self-esteem and corruption intentions. This research was conducted to determine the intensity of corruption in political party cadres from a new perspective. The data obtained from a sample of a political party was then processed using a linear regression technique with the help of IBM version 22 software. The results show that self-esteem has an effect of -0.152 ( $p = 0.002$ ) and ethical climate has an effect of -0.163 ( $p = 0.001$ ) on corruption intentions. Meanwhile, materialism becomes a partial mediator of the influence of self-esteem on corruption intentions. Internal factors within party cadres play an essential role in reducing the intensity of corruption. Programs of training activities that can improve the ethical climate in political party organizations are also urgently needed, such as *Politik Cerdas Berintegritas Terpadu* (PCB Terpadu) organized by *Komisi Pemberantasan Korupsi* (KPK) together with political parties to realize Indonesian politics with integrity.

**Keyword :** *Corruption Intention, Materialism, Self Esteem, Ethical Climate*

## 1. PENDAHULUAN

Kasus korupsi di Indonesia masih saja terjadi dari pemerintahan presiden

Soekarno hingga saat ini pada masa pemerintahan presiden Jokowi Widodo. Publik menganggap agenda pemberantasan korupsi yang ada pada masa pemerintahan presiden Jokowi Widodo periode kedua ini kurang mendapat dukungan. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil *Global Corruption Barometer* (GCB) yang mengalami stagnasi jika dibandingkan dari hasil survei sebelumnya.

Banyak kasus korupsi di Indonesia melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pejabat publik lainnya. Jika dilihat dari asal partai politik ada tiga partai politik besar yang mendominasi kasus korupsi (Saputra, 2019). Korupsi merupakan tindakan yang direncanakan oleh pelaku sehingga tidak mudah untuk diungkap dan biasanya publik akan mengetahuinya setelah menjadi sebuah skandal.

Korupsi juga merupakan perbuatan yang tanpa paksaan sehingga perbuatan tersebut terjadi karena adanya niat. Peneliti memandang niat korupsi terjadi karena adanya faktor internal (seperti harga diri) dan eksternal (seperti iklim etika) yang berperan. Penelitian niat korupsi pada kader partai politik masih belum banyak diungkapkan sehingga peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai intensi korupsi pada kader partai politik.

## 2. LANDASAN TEORI

Intensi Korupsi, dalam perspektif hukum seperti dalam peraturan bisnis dan perdagangan Amerika Serikat, niat korupsi merupakan upaya untuk mempengaruhi atau membujuk pejabat negara lain untuk bertindak yang bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya dijalankan (Volkov, 2019). Dari perspektif psikologi sosial intensi korupsi dapat dijelaskan mengapa seseorang terlibat kedalam sebuah perilaku atau menahan diri dari perilaku tersebut dengan teori perilaku terencana

(Ajzen, 1991), norma model aktivasi (Schwartz, 1977) dan teori fokus perilaku normatif (Kallgren dkk., 2000). Korupsi dapat dipahami sebagai perilaku kriminal yang terencana melibatkan proses kognitif, sikap dan intensi. Agbo & Iwundu (2016) berpendapat bahwa Intensi korupsi merupakan derajat dimana seseorang cenderung terlibat dalam korupsi dibandingkan dengan orang lain tanpa memandang apakah individu tersebut pernah melakukan korupsi atau tidak. Adapun aspek-aspek terkait intensi korupsi yang dikembangkan Agbo & Iwundu (2016) peneliti membaginya menjadi empat aspek, yaitu (1) persepsi korupsi yang salah, (2) memperkaya diri sendiri atau orang lain, (3) penyalahgunaan kesempatan dan (4) penyalahgunaan kewenangan.

Dalam penelitian ini ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi intensi korupsi, faktor pertama adalah harga diri. Perilaku seseorang dalam memandang dirinya sendiri merupakan hal yang sangat penting. Menurut Atwater & Duffy (2005) harga diri adalah penilaian personal terhadap diri sendiri dan menghasilkan persaan berharga atas konsep diri sendiri. Sejalan dengan itu, Solomon (2012) harga diri merupakan keyakinan yang ada pada seseorang tentang atributnya dan bagaimana mengevaluasi kualitas atributnya tersebut. Menurut Tafarodi & Swann (2001) harga diri pada dasarnya adalah sebuah fenomena estetika atau penilaian terhadap diri sendiri yang secara informal diungkapkan dengan “rasa menghargai” dan “rasa menyukai”. Adapun aspek-aspek harga diri menurut Tafarodi & Swann (2001) terdiri dari dua aspek, yaitu (1) *self-liking*, penilaian diri sendiri sebagai objek sosial, orang baik atau orang jahat. (2) *Self-competence*, penilaian diri sendiri sebagai unsur penyebab, mengacu pada arah tujuan positif atau negatif terhadap diri sendiri (Aulia & Sovitriana, 2021).

Menurut Sovitriana dkk. (2019) seseorang dengan harga diri rendah akan memiliki perasaan negatif seperti kurang berguna, tidak berharga, cemas, tidak puas akan pekerjaannya dan perasaan negatif lainnya yang menimbulkan tekanan dalam diri mereka. Untuk itu diperlukan harga diri yang tinggi agar dapat menciptakan perasaan positif seperti penelitian Liang dkk. (2016) yang menunjukkan bahwa seseorang dengan tingkat harga diri yang tinggi akan cenderung memiliki intensi korupsi yang rendah. Berdasarkan hal tersebut kami mengajukan hipotesis;

Ha1: Ada pengaruh negatif harga diri terhadap intensi korupsi kader partai politik.

Faktor kedua adalah iklim etika, partai politik merupakan organisasi yang mana setiap anggotanya memerlukan norma dalam berperilaku di organisasi tersebut. Norma diperlukan sebagai acuan etis atau tidak etis nya tindakan yang dilakukan. Köbis dkk. (2016) menjelaskan bahwa terjadinya korupsi dalam sebuah organisasi tidak terlepas dari adanya faktor tekanan, sistem dan peluang. Sistem yang buruk dalam sebuah organisasi menciptakan peluang bagi anggota organisasi untuk dimanfaatkan menghasilkan keuntungan pribadi. Lebih jauh lagi, akan merubah karakter seseorang dari orang baik menjadi seorang yang jahat karena tekanan dari lingkungan organisasi (Zimbardo, 2007) 2007). Menurut Arnaud (2010) iklim etika merupakan konsep molar yang mencerminkan isi dan kekuatan nilai-nilai etika, norma, sikap, perasaan, dan perilaku anggota dari suatu sistem sosial. Adapun aspek-aspek yang menyusun iklim etika menurut Arnaud (2010) terdiri dari empat aspek, yaitu: (1) *collective moral sensitivity*, (2) *collective moral judgment*, (3) *collective moral motivation*, dan (4) *collective moral character*.

Penelitian Gorsira dkk. (2018) menemukan bahwa iklim organisasi yang anggotanya memiliki etika yang rendah

dan mementingkan diri sendiri akan lebih rentan terhadap korupsi. Sehingga kami mengajukan hipotesis;

Ha2: Ada pengaruh negatif iklim etika terhadap intensi korupsi pada kader partai politik.

Faktor ketiga adalah materialisme, didefinisikan sebagai perspektif sosial, budaya, psikologis, dan ekonomi yang mempengaruhi pandangan hidup, orientasi nilai, sistem budaya, sifat dan kepribadian seorang individu (Bindah & Othman, 2011). Sifat dari seseorang yang memiliki sifat materialistis adalah sangat menghargai materi yang dapat dipamerkan, egosentris dan egois, gaya hidup mengikuti trend terbaru (Schiffman & Kanuk, 2000). Menurut Richins (2004) bahwa materialisme merupakan kepentingan yang dianggap berasal dari kepemilikan dan akuisisi barang material dalam mencapai tujuan hidup utama atau keadaan yang diinginkan. Adapun aspek-aspek dari materialisme menurut Richins (2004) yaitu; (1) *acquisition centrality*, sentralitas kepemilikan dalam kehidupan seseorang, kepemilikan materi yang ada digunakan untuk menilai diri sendiri dan orang lain (2) *possession defined success*, kesuksesan hidup diukur dari keberhasilan jumlah dan kualitas kepemilikannya, (3) *acquisition as the pursuit of happiness*, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup adalah dengan memiliki harta benda.

Menurut Liang dkk. (2016) faktor harga diri yang rendah membuat seseorang menjadi materialistis, sehingga dapat memunculkan niat seseorang untuk melakukan korupsi. Hal tersebut melandasi kami mengajukan hipotesis; Ha3: Ada pengaruh materialisme terhadap intensi korupsi pada kader partai politik. Ha4: Ada pengaruh harga diri terhadap intensi korupsi dengan materialisme sebagai mediator pada kader partai politik.

### 3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan sampel dari sebuah organisasi partai politik yang memiliki cabang organisasi di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan sampel 400 dari populasi 2.300 orang kader. Peneliti memilih pulau Sumatera karena berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kepala Daerah dan anggota DPRD yang pernah berstatus tersangka korupsi berasal dari pulau Sumatera (Gabrillin, 2018). Adapun pengambilan sampel uji coba alat ukur hingga pengambilan sampel uji hipotesis dilakukan mulai Oktober 2022 dan berakhir di Februari 2023.

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) *Corruption Propensity Scale* (CPS) Agbo & Iwundu (2016) yang terdiri dari 18 butir, (2) *Materialism Value Scale* (MVS) Richins (2004) yang terdiri dari 18 butir, (3) *Self-Liking self-Competence Scale* (SLCS) Tafarodi & Swann (2001) yang terdiri dari 16 butir, (4) *Ethical Climate Index* (ECI) Arnaud (2010) yang terdiri dari 18 butir. Metode pengumpulan data dengan menggunakan skala likert 1-5. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier dengan bantuan PROCESS versi 4.0 Andrew F. Hayes pada *Software* IBM SPSS versi 22.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap pertama hasil penelitian ini menunjukkan gambaran mengenai karakteristik dari responden penelitian. Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar responden adalah kader laki-laki (65.25%) dan sebagian kecilnya adalah perempuan (34.75%). Kemudian peneliti membagi responden berdasarkan rentang usia dan jenis kelamin. Responden dengan jenis kelamin laki-laki terbanyak pada rentang usia 41-45 tahun (23.75%) dan responden perempuan terbanyak pada rentang usia 36-40 tahun (30.93%).

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif diperoleh distribusi frekuensi skor instrumen intensi korupsi

*mean* atau rata-rata sebesar 2.93. Sementara itu instrumen lainnya seperti harga diri, iklim etika dan materialism berturut-turut adalah sebesar 3.12, 2.92, dan 2.78.

Penelitian ini juga menghasilkan beberapa nilai dari hasil uji prasyarat yang kami lakukan sebelum melakukan uji hipotesis. Adapun nilai tersebut antara lain; (1) nilai normalitas keempat variabel adalah berdistribusi normal, (2) nilai signifikansi  $>0.05$  pada uji *Glesjer* sehingga ketiga variabel bebas tidak memiliki atau bebas heteroskedastisitas (3) nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)  $< 10$  dan nilai *Tolerance*  $> 0.10$  pada ketiga variabel bebas sehingga tidak terjadi multikolinieritas, (4) nilai *d* (*durbin watson*) 2.045 terletak antara *dU* 1.856 dan (*4-dU*) 2.144 sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi Auto kolerasi.

Peneliti kemudian melanjutkan pengujian hipotesis dengan analisis jalur pengaruh harga diri, iklim etika dan materialisme terhadap intensi korupsi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh langsung harga diri terhadap intensi korupsi dengan nilai  $\beta = -0.152$  ( $p=0.002$ ) dan  $t_{hitung} -3.072 > t_{tabel} 1,655$  sehingga  $H_{a1}$  diterima. Hasil pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini menunjukkan nilai  $\beta = -0.163$  ( $p=0.001$ ) dan  $t_{hitung} -3.305 > t_{tabel} 1,655$  sehingga  $H_{a2}$  diterima atau dengan kata lain terdapat pengaruh iklim etika terhadap intensi korupsi, dan mendukung penelitian Gorsira dkk. (2018). Adanya kasus korupsi di beberapa partai politik juga mencerminkan bagaimana iklim dan suasana etis organisasi tersebut ketika menghadapi suatu persoalan (Kish-Gepart dkk., 2010).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh materialisme terhadap intensi korupsi, dimana nilai  $\beta = 0.325$  ( $p=0.000$ ) dan  $t_{hitung} 6.851 > t_{tabel} 1,655$  dengan demikian  $H_{a3}$  diterima. Pada pengujian hipotesis keempat mengenai peran materialisme sebagai mediator pada pengaruh harga diri

terhadap intensi korupsi, penelitian menunjukkan bahwa harga diri dan materialisme secara bersama mempengaruhi intensi korupsi. Namun terlihat signifikansi pengaruh harga diri mengalami penurunan  $\beta = -0.095$  ( $p=0.049$ ) sementara itu signifikansi pengaruh materialisme relatif tetap  $\beta = 0.307$  ( $p=0.000$ ). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liang dkk. (2016) dimana pengaruh harga diri terhadap intensi korupsi tanpa materialisme lebih tinggi dibanding dengan adanya materialisme.

Peneliti kemudian melanjutkan dengan menguji menggunakan metode Andrew F Hayes. Hasilnya menunjukkan nilai *Indirect effect* -0.109 lebih kecil dari *Direct effect* -0.180 ( $p=0.049$ ), dengan *Total effect* harga diri terhadap intensi korupsi dengan adanya materialisme adalah sebesar -0.289 ( $p=0.002$ ). Sehingga Ha4 diterima, atau dengan kata lain terdapat pengaruh harga diri terhadap intensi korupsi dengan materialisme sebagai mediator.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang kami dapat, terdapat pengaruh langsung negatif harga diri dan iklim etika terhadap intensi korupsi. Peningkatan materialisme menjadi perantara Penurunan pengaruh negatif harga diri terhadap intensi korupsi. Penguatan positif semangat antikorupsi seperti program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu (PCB Terpadu) yang diselenggarakan KPK bersama partai politik diharapkan dapat meningkatkan iklim etika organisasi partai politik sehingga dapat mewujudkan perpolitikan Indonesia lebih bersih, beretika dan bebas dari korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

Agbo, A. A., & Iwundu, E. I. (2016). Corruption as a propensity: Personality and motivational determinants among Nigerians. *The*

*Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied*, 150(4), 502-526. doi:10.1080/00223980.2015.1107523

- Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: a theory of planned behaviour. Dalam J. K. Beckmann, *Action-control: from cognition to behaviour* (hal. 11-39).
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.
- Arnaud, A. (2010). Conceptualizing and Measuring Ethical Work Climate: Development and Validation of the Ethical Climate Index. *Business & Society*, 49(2), 345-358. doi:10.1177/0007650310362865
- Atwater, E., & Duffy, K. G. (2005). *Psychology for Living: Adjustment, Growth and Behavior Today*. Pearson Education, Inc.
- Aulia, D. A., & Sovitriana, R. (2021). Terapi realitas untuk meningkatkan self esteem pada wanita di panti sosial. *Jurnal Ilmiah Psikologi MIND SET*, 1(01), 117-126. doi:10.35814/mindset.v1i01.2613
- Bindah, E. V., & Othman, M. N. (2011). The Role of Family Communication and Television Viewing in the Development of Materialistic Values among Young Adults. A Review. *International Journal of Business and Social Science*, 2(23), 238-248.
- Gabrilin, A. (2018, September 18). Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/18/13412061/kpk-36-kepala-daerah-dan-86-anggota-dprd-di-sumatera-tersangkut-kasus>
- Gorsira, M., Steg, L., Denkers, A., & Huisman, W. (2018). Corruption in Organizations: Ethical Climate and Individual Motives. *Administrative Sciences*, 8(1), 4. doi:10.3390/admsci8010004
- Kallgren, C. A., Reno, R. R., & Cialdini, R. B. (2000). A Focus Theory of Normative Conduct: When Norms Do and Do not Affect Behavior. *Personality and Social Psychology*

- Bulletin*, 26(8), 1002-1012. doi:10.1177/01461672002610009
- Kish-Gephart, J., Harrison, D. A., & Treviño, L. K. (2010). Bad Apples, Bad Cases, and Bad Barrels: Meta-Analytic Evidence About Sources of Unethical Decisions at Work. *Journal of Applied Psychology*, 95(1), 1-31. doi:10.1037/a0017103
- Köbis, N. C., van Prooijen, J.-W., Righetti, F., & van Lange, P. A. (2016). Prospection in Individual and Interpersonal Corruption Dilemmas. *Review of General Psychology*, 20(1), 71-85. doi:10.1037/gpr0000069
- Liang, Y., Liu, L., Tan, X., Huang, Z., Dang, J., & Zheng, W. (2016). The Effect of Self-Esteem on Corrupt Intention: The Mediating Role of Materialism. *Frontiers Psychology*, 7, 1063. doi:10.3389/fpsyg.2016.01063
- Richins, M. L. (2004). The Material Values Scale: Measurement Properties and Development of a Short Form. *Journal of Consumer Research*, 31, 209-219. doi:10.1086/383436
- Saputra, E. H. (2019, April 7). Diambil kembali dari Kumparan.com: kumparan.com/kumparannews/icw-golkar-partai-terkorup-di-dpr-dprd-periode-2014-2019-1qqB81R3Q3k/full
- Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2000). *Consumer Behaviour* (7th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Schwartz, S. H. (1977). Normative influences on altruism. *Advances in Experimental Social*, 10, 221-279. doi:10.1016/S0065-2601(08)60358-5
- Solomon, M. (2012). *Consumer Behavior-Buying, Having and Being*. New Jersey: Prentice Hall.
- Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S., & Hogg, M. K. (2006). *Consumer Behaviour: A European Perspective*. Madrid: Pearson Education Limited.
- Sovitriana, R., Santosa, A. D., & Hendrayani, F. (2019). Teacher burnout and self esteem in tangerang's junior high school teachers. *International Review of Management and Marketing*, 9(2), 26-30. doi:10.32479/irmm.7641
- Tafarodi, R. W., & Swann, W. B. (2001). Two-dimensional self-esteem: Theory and measurement. *Personality and Individual Differences*, 31(5), 653-673. doi:10.1016/S0191-8869(00)00169-0
- Volkov, M. (2019, July 29). *volkovLaw.com*. Diambil kembali dari <https://blog.volkovlaw.com/2019/07/corrupt-intent-and-bribery/>
- Zimbardo, P. (2007). *The Lucifer effect: understanding how good people turn evil*. New York: Random House.